Antisipasi Kelangkaan Pangan, Pemprov DKI Jalin Kerja Sama dengan Pemkab Ngawi

×

Realitarakyat.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur jalin kerja sama untuk mencapai kekuatan pangan di kedua daerah, Minggu (25/4/2021).

Kerja sama pertanian antardaerah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Bupati Ngawi Ony Anwar dan disaksikan langsung Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, kerja sama itu diperlukan DKI Jakarta karena 99 persen kebutuhan pangan di Ibu Kota dipasok dari luar Jakarta.

Anies berharap kerja sama itu dapat menjaga pasokan serta menyeimbangkan kurva penawaran dan permintaan agar tidak terjadi kelangkaan dan membuat harga pangan di Ibu Kota menjadi terjangkau.

Berikutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya terus berupaya memperluas cakupan serapan gabah untuk pasokan beras di Jakarta.

Sebelumnya, PT Food Station juga telah mengadakan kerja sama antardaerah di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap, dengan mengekspansi lahan pertanian seluas 1.000 hektare di sana.

Gubernur Anies juga berharap dapat mewujudkan amanat konstitusi yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terlebih, DKI Jakarta sebagai kota penyumbang perekonomian terbesar harus bisa memberikan manfaat bagi daerah lain, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani.

"Kami di pemerintahan disumpah melaksanakan konstitusi dan perintah konstitusi adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Kerja sama ini satu sisi ingin memenuhi kebutuhan pangan di Jakarta dan di sisi lain ingin menghadirkan keadilan sosial, khususnya untuk para petani daerah agar mereka mendapat manfaat lebih besar, mendapat peningkatan kesejahteraan, dan mendapat kepastian atas produk-produk pertanian yang dihasilkan.

"Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani terus dilakukan melalui poin-poin dalam kerja sama ini," ujar Anies.

Salah satunya adalah sistem resi gudang yang membuat petani tidak perlu buruburu menjual harga gabah mereka dengan harga rendah, melainkan dapat menyimpannya terlebih dahulu, meningkatkan kualitas, sehingga menstabilkan harga.

"Melalui sistem resi gudang ini, petani akan memiliki kepastian terkait harga produk mereka. Selain itu, dengan menyimpannya di resi gudang, mereka juga bisa memanfaatkan untuk mengambil pinjaman pembiayaan dari lembaga keuangan," ujar Anies.

Berharap diperluas

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap kerja sama itu diperluas lagi dalam berbagai aspek, karena kebutuhan pangan di sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami surplus dan para produsen kesulitan memasarkannya.

"Kami akan menjadi bagian penguatan kerja sama ini dan kami mohon agar kami bisa akses lebih banyak dan menghubungkan para gapoktan agar mereka mendapatkan pasar lebih besar, terutama di Jakarta," kata Khofifah.

PT Food Station telah melakukan kerja sama dengan Daya Tani Sembada dan Kelompok Tani Sido Rukun sejak 2015 melalui tiga bentuk kerja sama, antara lain, pertama, pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Dalam dua tahun terakhir, Gudang SRG tersebut bisa menyimpan rata-rata 600 ton, sedangkan target 2021 sebanyak 1.000 ton.

Melalui SRG tersebut, PT Food Station akan membantu menjadi pembeli siaga (standby buyer) dengan harga yang baik, sehingga para petani tidak perlu susah-susah mencari pembeli.

Hasil pertanian yang disimpan di Gudang SRG akan mendapat resi. Dari resi itu, petani bisa menjaminkan ke bank yang dipilih untuk mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha untuk biaya tanam di musim berikutnya.

Dengan penyimpanan di Gudang SRG, maka petani bisa menjual hasil panennya saat harga sudah baik. Dengan SRG, petani bisa menyimpan gabah kering giling, beras pecah kulit, atau glosor dengan kadar air antara 12 -14 persen. (ndi)